

CANDRA NURAINI

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

DWIDJONO HADI DARWANTO, MASYHURI, JAMHARI

Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

candra151274@gmail.com

Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya

DOI:10.18196/agr.2121

ABSTRACT

This study aims to: (1) to identify the forms of institutional and analyze interaction at the institutional organic rice agribusiness; (2) to design the institutional model in organic rice agribusiness. The study was conducted by using descriptive method. Result of the analysis showed that the profile of organic rice agribusiness institutions include: farmers, farmers' groups combined Sympathy, organic farmers cooperatives, village cooperatives, private enterprises agro-industry (CV), BPP, NGO, exporters, agro-industry company. The conditions of farmer organizations today are more cultural and mostly just to government facilities, it has not been fully geared to take advantage of economic opportunities through the use of accessibility to

information technology, capital and markets necessary for the development of organic rice agribusiness and agricultural businesses. On the other hand, institutional businesses in rural areas, such as the cooperative has not fully accommodate the interests of farmers / farmer groups as a forum for technical guidance. Various farmer institution that already exist such as farmers 'groups, farmers' groups combined, the association of water user farmers are expected on the challenges ahead to revitalize themselves and institutions that currently more dominant just as container technical development and social into institutional also serve as a platform for business development legal entity or can integrate other institutions in the agribusiness chain of organic rice. Model on organic rice agribusiness institution system is based on agribusiness and institutional dimensions as well as the three pillars of the new institutional.

Keywords: institutional, agribisnis, organic rice.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk: i) mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan dan menganalisis interaksi kelembagaan pada agribisnis padi organik; ii) merancang model kelembagaan pada agribisnis padi organik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa profil lembaga agribisnis padi organik meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani Simpati, koperasi petani organik, koperasi desa, perusahaan swasta agroindustri (CV), BPP, NGO, eksportir, perusahaan agroindustri. Kondisi kelembagaan organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan agribisnis padi organik dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum sepenuhnya mengakomodasi

kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, perhimpunan petani pemakai air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri; dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial, menjadi kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha berbadan hukum atau dapat berintegrasi dengan lembaga lain dalam rantai agribisnis padi organik. Model pada kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem agribisnis dan dimensi kelembagaan serta tiga pilar kelembagaan baru.

Kata kunci: kelembagaan, agribisnis, padi organik.

PENDAHULUAN

Era globalisasi menuntut kesiapan negara-negara di dunia menghadapi perdagangan bebas, termasuk Indonesia, sebagai negara agraris untuk berkompetisi di dunia internasional, khususnya komoditi pertanian. Salah satu komoditi yang memiliki potensi untuk bersaing adalah beras organik, terbukti dengan telah dilakukan ekspor beras organik ke berbagai negara di dunia. Seiring dengan tantangan tersebut, Indonesia menghadapi berbagai masalah klasik dalam pembangunan agribisnis. Permasalahan agribisnis, antara lain kondisi struktur agribisnis yang bersifat dispersal atau tersekat-sekat, yang ditunjukkan dari adanya pemisahan keterkaitan setiap subsistem satu dengan subsistem yang lain atau subsistem hulu sampai hilir. Aktivitas dalam subsistem agribisnis digerakkan oleh lembaga, sehingga rangkaian aktivitas dalam sistem agribisnis digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Peranan kelembagaan dalam sistem agribisnis sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di masa depan.

Secara umum struktur agribisnis saat ini dapat digolongkan sebagai *tipe dispersal*. Struktur agribisnis dispersal dicirikan oleh tiadanya hubungan organisasi fungsional diantara setiap tingkatan usaha. Jaringan agribisnis praktis hanya diikat dan dikoordinir oleh mekanisme pasar (harga). Hubungan diantara sesama pelaku agribisnis praktis bersifat tidak langsung dan impersonal. Dengan demikian setiap pelaku agribisnis hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Bahkan hubungan di antara pelaku agribisnis cenderung berkembang menjadi bersifat eksploitatif. Pola agribisnis

dispersal tersebut diperburuk oleh berkembangnya asosiasi pengusaha horizontal (usaha sejenis) yang bersifat asimetri dan cenderung berfungsi sebagai kartel. Sifat asimetri terlihat dari tiadanya asosiasi para pelaku agribisnis yang efektif di tingkat hulu (petani), sedangkan asosiasi pelaku agribisnis di tingkat hilir (industri pengolahan, pedagang/eksportir) sangat kuat. Hal inilah yang membuat organisasi usaha dalam sektor agribisnis cenderung berperan sebagai sebuah kartel yang memiliki kekuatan monopsonistis maupun kekuatan monopolistik.

Dengan kondisi demikian, sebagai implementasi dari strategi peningkatan produksi beras, maka diperlukan sedikitnya 10 paket program pengembangan agribisnis padi (Simatupang dan Rusastra 2004). Salah satu paket yang terkait dengan permasalahan diatas adalah restrukturisasi lembaga pelayanan dan pemberdayaan petani melalui pemberdayaan kelembagaan lokal serta organisasi petani dan advokasi untuk kepentingan petani. Berdasarkan pada kondisi yang terjadi di tingkat bawah dan kebijakan pemerintah maka perlu penguatan kelembagaan dalam sistem agribisnis, sehingga menjadikan berbagai kelembagaan tersebut terintegrasi antara antara subsistem satu dengan dengan subsistem yang lain, karena aspek kelembagaan merupakan syarat pokok agar agar struktur agribisnis menjadi sistem agribisnis yang terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan. Saleh *et al.* (2007) mengatakan bahwa kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatur hubungan antar individu untuk penguasaan faktor produksi yang langka. Kelembagaan mempunyai peran strategis, namun menurut Soekartawi (2001) aspek kelembagaan, baik formal maupun informal justru merupakan aspek yang menonjol yang dapat menghambat pembangunan pertanian di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena kelembagaan yang ada di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia masih banyak yang belum optimal.

Definisi kelembagaan mencakup dua demarkasi penting, yaitu i) norma dan konvensi (*norms and conventions*), serta ii) aturan main (*rules of the game*). Kelembagaan kadang tertulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak tertulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan umumnya dapat diprediksi dan cukup stabil, serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang, sehingga sering diartikan sebagai seperangkat aturan main atau tata cara untuk kelangsungan sekumpulan kepentingan (*a set of*

working rules of going concerns). Jadi, definisi kelembagaan adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yurisdiksi, pembebasan atau liberasi, dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu (Arifin, 2005).

Berdasarkan tingkatannya, kelembagaan dapat dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: pranata sosial, kelompok, organisasi atau perhimpunan, dan lembaga instansional. *Pranata sosial* adalah aturan-aturan tertentu yang dianut oleh masyarakat secara umum dan meluas, misalnya sistem sewa tanah, bagi hasil, ijon, pinjam meminjam antar petani, bayar pinjaman setelah panen, dan lain-lain. *Kelompok* (tani) adalah kumpulan (petani-petani) yang bersifat informal. Ikatan-ikatan dalam kelompok berpangkal pada keserasian dalam arti mempunyai kesamaan dalam pandangan, kepentingan, dan pekerjaan serta ketenangan yang sama, misalnya kelompok pendengar siaran pedesaan, kelompok arisan. *Organisasi* atau perhimpunan (petani) adalah organisasi (petani) yang sifatnya formal, ada pengurus dan anggota-anggota yang jelas terdaftar. Organisasi (petani) ini mempunyai anggaran rumah tangga yang tertulis, mencantumkan tujuan-tujuan, usaha-usaha, syarat-syarat keanggotaan, dan ketentuan lainnya (Adjid, 2001).

Interaksi antara teori kelembagaan dan organisasi melahirkan teori kelembagaan baru. Sumbangan utama dari kelembagaan baru adalah penambahan pengaruh dari pengetahuan, ketika individu bertindak karena persepsinya terhadap dunia sosial (Nee dan Ingram dalam Syahyuti, 2010). Semenjak era sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru, terdapat tiga aspek pokok yang dikaji dalam kelembagaan, yakni aspek-aspek normatif, regulatif, dan kultural-kognitif. Fungsi lembaga adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun dapat berubah. Bagi petani, lembaga memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis. Berbagai norma yang hidup di masyarakat termasuk norma-norma pasar beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan petani untuk bertindak sebagaimana petani memahaminya (kultural-kognitif).

Sesuai dengan sistematika yang disusun Scoot (2008) dalam Syahyuti (2011), pendekatan kelembagaan baru mencakup tiga pilar. Pendekatan ini telah merangkum seluruh pemikiran yang berkembang berkenaan dengan lembaga dalam bidang sosiologi, semenjak era sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru. Ketiga pilar tersebut, meliputi pilar regulatif, pilar

normatif dan pilar kultural-kognitif. Objek perhatian pada pilar regulatif adalah aturan yang ada dan “keuntungan apa” yang akan diperoleh pelaku dalam bertindak. Binswanger dan Ruttan (1978), menyebut lembaga sebagai “... *the set of behavioral rules that govern a particular pattern of section and relationship*”. Sejalan dengan ini, Nee (2005) dalam konteks analisa kelembagaan menyebutkan hubungan antara proses formal dan informal pada lingkungan kelembagaan. Hal lain, bahwa lembaga diukur dari kapasitasnya untuk menegakkan aturan, misalnya melalui *reward* dan *punishment*. Aturan ditegakkan melalui mekanisme formal dan informal. Objek perhatian pada pilar normatif adalah norma-norma yang hidup dan disepakati di tengah masyarakat. Norma merupakan komponen pokok dan paling awal dalam lembaga. Fokus perhatian pada pilar kultural-kognitif adalah pengetahuan kultural yang dimiliki individu dan masyarakat, dengan menggunakan perspektif sosiologi pengetahuan. Berdasarkan pada ketiga pilar tersebut, “lembaga” dapat dirumuskan sebagai hal yang berisi norma, regulasi dan kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, dan sekaligus hambatan untuk bertindak sebagai aktor. Demikian pula untuk petani, lembaga memberikan pedoman bagi petani dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari khususnya dalam bidang agribisnis.

Menurut Mackay *et al.* dalam Syahyuti (2004), ada empat dimensi untuk mempelajari suatu kelembagaan (*institutional assesment*), yakni: i) kondisi lingkungan eksternal (*the environment*), ii) motivasi kelembagaan (*institutional motivation*), iii) kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), dan iv) kinerja kelembagaan (*institutional performance*).

Pertama, lingkungan eksternal meliputi kondisi politik dan pemerintahan (*administratif and external policies environment*), sosiokultural (*sociocultural environment*), teknologi (*technological environment*), kondisi perekonomian (*economic environment*), berbagai kelompok kepentingan (*stakeholders*), infrastruktur, serta kebijakan terhadap pengelolaan sumberdaya alam (*policy natural resources environment*).

Kedua, motivasi kelembagaan (*institutional motivation*). Kelembagaan dipandang sebagai suatu unit kajian yang memiliki jiwanya sendiri, terdapat empat aspek yang bisa dipelajari untuk mengetahui motivasi kelembagaan yaitu sejarah kelembagaan (*institutional history*), misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam

bersikap dan berperilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut (*incentive schemes*). Suatu fakta sosial adalah fakta historik, sejarah perjalanan kelembagaan merupakan pintu masuk yang baik untuk mengenali secara cepat aspek aspek kelembagaan yang lain.

Tiga, kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*), meliputi bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Kemampuan tersebut diukur dari lima aspek, yaitu: strategi kepemimpinan yang dipakai (*strategic leadership*), perencanaan program (*program planning*), manajemen dan pelaksanaannya (*management and execution*), alokasi sumberdaya yang dimiliki (*resource allocation*), dan hubungan dengan pihak luar yaitu terhadap *clients, partners, government policymakers*, dan *external donors*.

Empat, kinerja kelembagaan (*institutional performance*), terdiri dari: keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan di luarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kalkulasi secara ekonomi merupakan prinsip yang menjadi latar belakangnya.

Pendekatan sistem agribisnis memandang bahwa pertanian kecil komoditas tertentu di daerah tertentu bisa bergerak, hanya jika dikonsolidasikan dan terhubung dengan seluruh pelaku dalam rantai komoditas dan didukung oleh infrastruktur publik. Hal ini dapat dikatakan unit agribisnis industrial, di mana semua pelaku dalam rantai komoditas bersatu seperti sebuah perusahaan industri yang terintegrasi.

Analisis kelembagaan dalam bidang pertanian adalah analisis yang ditujukan untuk memperoleh deskripsi mengenai suatu fenomena sosial ekonomi pertanian yang berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi, mencakup dinamika aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, disertai dengan analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari interaksi yang terjadi. Dalam batas-batas tertentu analisis kelembagaan dapat berlaku umum di berbagai wilayah dan keadaan, namun dalam banyak hal aspek lokalitas dan permasalahan spesifik harus selalu memperoleh penekanan, mengingat peluang besar terjadinya variasi per lokasi maupun permasalahan (Syahyuti, 2002).

Penelitian ini bertujuan untuk: i) mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan dan menganalisis interaksi kelembagaan pada agribisnis padi organik; ii) merancang model kelembagaan pada agribisnis padi organik.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005). Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka atau pendekatan kualitatif berupa penggambaran keadaan secara naratif (kata-kata) apa adanya (Sukmadinata, 2011).

Kabupaten Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan kabupaten tersebut merupakan salah satu penghasil padi organik di Indonesia dengan luas areal 120,245 Ha dan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Penelitian ini difokuskan pada Gapoktan Simpatik yang merupakan organisasi petani padi organik di Kabupaten Tasikmalaya dan podusen utama beras organik yang telah disertifikasi internasional.

Identifikasi pola-pola dan karakteristik kelembagaan pada usahatani padi organik dilakukan dengan menggunakan analisis kelembagaan dengan metode kualitatif deskriptif didasarkan pada sifat-sifat data yang diperoleh dengan memperhatikan proporsi pengetahuan kelembagaan. Data dan informasi dijabarkan dan diinterpretasikan menurut alur logika melalui penerapan statistik induktif (Bailey, 1992) dan deskriptif dengan menerapkan pendekatan dan analisis sistem. Bahan kajian meliputi dinamika kelembagaan usaha tani dalam tiap segmen kegiatan dalam siklus produksi tahunan dan dalam setiap subsistem dari sistem agribisnis. Dari tiap segmen dan subsistem dirinci kondisi aktual kelembagaan saat pengamatan dilakukan, serta dinamika, masalah, dan alternatif pemecahan masalah. Tiap segmen analisis menunjukkan keterkaitan antara rincian analisis dengan jenis kegiatan dalam siklus produksi rutin.

PEMBAHASAN

KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PADI ORGANIK

Kelembagaan merupakan basis terbentuknya modal sosial yang dapat memfasilitasi kerjasama dalam aktivitas agribisnis padi organik. Dukungan kelembagaan dalam pengembangan sistem pertanian organik mempunyai peranan penting dalam setiap aktivitas masing-masing subsistem agribisnis. Modal sosial petani yang meliputi jaringan kerjasama, saling percaya dalam kerjasama, dan norma kerjasama dalam sistem pertanian organik akan

mempengaruhi keberhasilan agribisnis. Dalam konteks pengembangan kelembagaan agribisnis perlu dilakukan analisis kebijakan yang menyangkut kebijakan input, budidaya, produk, pemasaran dan perdagangan.

KELEMBAGAAN SUBSISTEM AGRIBISNIS HULU

Kelembagaan pada subsistem agribisnis hulu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya input yang dibutuhkan petani untuk usahatani padi organik seperti pupuk organik, benih dan pestisida organik. Kelembagaan penyedia input terdiri dari gapoktan, kelompok tani, agro-industri kelapa dan kelompok peternak. Gapoktan Simpatik selain berperan sebagai pembeli padi organik dari petani, juga sebagai penyedia input, antara lain benih dan pupuk organik. Hasil olahan pupuk organik oleh Gapoktan Simpatik, dibagikan pada kelompok-kelompok yang membutuhkan pupuk organik. Untuk menjaga kontinuitas penyediaan pupuk organik, perlu upaya pemberdayaan kelompok tani sebagai penyedia pupuk organik untuk anggotanya melalui pengelolaan peternakan sapi. Dengan demikian kelompok tani padi organik dapat berperan sebagai produsen pupuk organik. Beberapa kelompok tani padi organik mendapatkan bantuan hewan ternak (sapi) dan mesin pengolah pupuk dari pemerintah. Dengan bantuan mesin pengolahan pupuk organik diharapkan program pemberdayaan kelompok tercapai, antara lain sebagai upaya untuk penyediaan pupuk organik, minimal bagi anggota kelompok. Bahkan kelompok tani mampu melayani kebutuhan pupuk organik dari kelompok lain di wilayah tersebut. Pihak lain yang turut dalam memasok bahan baku pembuatan pupuk organik adalah agro-industri kelapa.

KELEMBAGAAN SUBSISTEM USAHATANI (ON FARM AGRIBUSINESS) PADI ORGANIK

Subsistem yang kedua pada kelembagaan padi organik adalah subsistem usahatani. Peran subsistem adalah melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, yakni padi organik. Pada kelembagaan ini, kelompok tani adalah pelaku utama yang terdiri dari petani padi organik, baik petani yang disertifikasi dan petani non sertifikasi. Kelompok tani yang disertifikasi internasional tergabung dalam Gapoktan Simpatik dan telah menerapkan manajemen modern dalam kegiatan usahatani, antara lain adanya

pencatatan dalam berbagai aktivitas usahatani. Aktivitas usahatani dari pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai dengan pasca panen telah sesuai dengan manajemen mutu secara standar internasional. Kontrol terhadap kualitas budidaya dilakukan secara rutin oleh ICS (*Internal Control System*). Sertifikasi internasional dilakukan 1-2 kali dalam setahun oleh IMO. Hal ini dilakukan sebagai persyaratan untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai standar internasional. Keterkaitan antara kelompok tani, gabungan kelompok tani, penyuluh pertanian, perusahaan beras organik, NGO dan lembaga pensertifikasi sangat erat dalam proses budidaya padi organik. Lembaga-lembaga tersebut bersinergi untuk menghasilkan dan menjamin produk dari subsistem usahatani agar memenuhi standar internasional.

KELEMBAGAAN SUBSISTEM AGRIBISNIS HILIR

Subsistem yang ketiga pada kelembagaan padi organik adalah subsistem agribisnis hilir. Produk primer yang dihasilkan oleh subsistem usahatani (*on-farm*) padi organik adalah gabah. Selanjutnya produk primer tersebut (gabah) diproses oleh subsistem agribisnis hilir. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah dari padi produk primer tersebut (padi/gabah). Produk yang dihasilkan dari proses pengolahan ini adalah beras organik yang sesuai standar internasional. Pelaku utama pada subsistem agroindustri untuk padi organik yang tersertifikasi ini adalah gabungan kelompok tani, perusahaan swasta CV. Alam Subur, lembaga pensertifikasi, dan perusahaan eksportir. Sementara untuk padi organik non sertifikasi, proses pengolahan dilakukan oleh perusahaan penggilingan swasta (tingkat desa) yang pada umumnya bercampur dengan padi atau gabah konvensional. Karenanya padi/gabah non sertifikasi tidak didistribusikan ke Gapoktan "Simpati", yang proses pengolahan padi organiknya dilakukan dengan menggunakan mesin modern sesuai dengan standar internasional.

Subsistem agribisnis pemasaran adalah subsistem yang melakukan aktivitas pemasaran produk beras organik sampai ke tangan konsumen. Pada subsistem terdapat beberapa lembaga pemasaran yang terlibat dalam pelaksanaan pendistribusian produk dari produsen ke konsumen. Pelaku pada subsistem ini, untuk beras organik yang tersertifikasi adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani Simpati (beras organik

sertifikasi internasional), perusahaan swasta (CV. Alam subur), supermarket dan eksportir (untuk konsumen di luar negeri). Sementara itu, untuk beras organik non sertifikasi dilakukan oleh kelompok tani dan perusahaan penggilingan di tingkat desa (*huller*). Dalam perkembangannya pemasaran oleh Gapoktan Simpati dilakukan oleh koperasi yang didirikan oleh gapoktan (Simpati) untuk beras organik yang disertifikasi nasional. Peran koperasi adalah melakukan pembelian gabah dari petani dan melakukan pemasaran produk dari Gapoktan ke grosir dan konsumen. Keberadaan koperasi diharapkan memfasilitasi keterlibatan petani dalam kegiatan pemasaran, sehingga petan menikmati keuntungan dari aktivitas pemasaran. Dalam penelitian ini ditemukan adanya koperasi desa yang terlibat dalam pemasaran padi organik dengan melakukan kerjasama dengan Gapoktan Simpati. Peran dari koperasi ini adalah melakukan pembelian gabah dari petani dan selanjutnya didistribusikan ke Gapoktan Simpati.

KELEMBAGAAN SUBSISTEM PENUNJANG AGRIBISNIS PADI ORGANIK

Peran dari subsistem penunjang pada agribisnis padi organik adalah memberikan dukungan terhadap kelembagaan subsistem yang lainnya. Kelembagaan penunjang yang terpenting adalah lembaga keuangan, perkumpulan petani pemakai air, ataupun lembaga penyuluh pertanian., lembaga sertifikasi baik internasional maupun nasional. Agribisnis padi organik juga didukung oleh NGO (internasional) dan Aliansi Organik Indonesia. Peran kelembagaan adalah memberikan berbagai pelatihan-pelatihan kepada petani maupun kelompok tani pertanian organik. Pada subsistem ini, keberadaan koperasi juga memiliki peran yang penting dalam memberikan kredit kepada petani.

DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

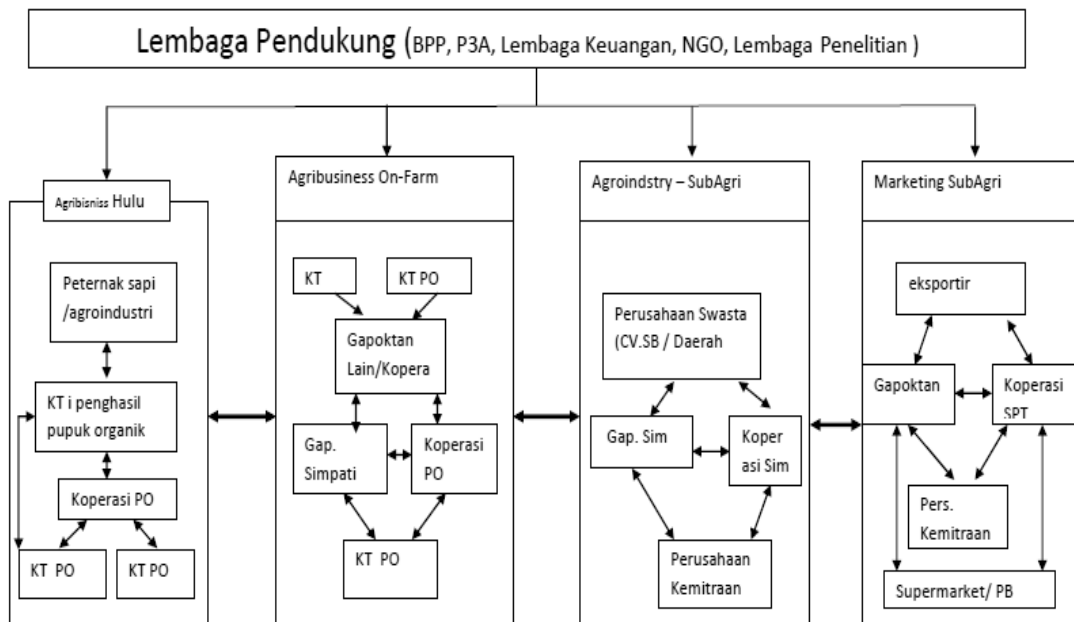
Kebijakan pembangunan pertanian organik telah dicanangkan kementerian Pertanian sejak 2001 yakni program “Indonesia Go Organik”. Pada tahun 2005, masuk dalam program revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan nama *Program Go Organik 2010*. Hal ini juga didukung program subsidi pupuk tidak hanya untuk pupuk tunggal, tetapi sudah dikembangkan juga untuk pupuk majemuk (NPK), dan mulai tahun 2008 diikuti pupuk organik. Implementasi program *Go Green* dikawal

peraturan menteri pertanian nomor 64/permentan/ot.140/5/2013 tentang sistem pertanian organik. Di tingkat daerah didukung Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya “Terwujudnya Pembangunan Pertanian Yang Berkelanjutan Berbasis Perdesaan”. Implementasi visi tersebut diwujudkan melalui program pengembangan agribisnis padi organik, dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada setiap kelompok secara bergilir. Hal ini memberikan rangsangan untuk melakukan pertanian organik.

MODEL KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PADI ORGANIK

Model kelembagaan untuk pengembangan agribisnis padi organik didasarkan pada pendekatan sistem agribisnis dan empat dimensi kelembagaan (Kusnandar *et al.* 2013) yang mencakup beberapa subsistem, yaitu: i) subsistem hulu, ii) subsistem usahatani, iii) subsistem hilir, iv) subsistem agroindustri, dan v) subsistem sarana penunjang.

Posisi petani dalam agribisnis padi sampai saat ini, masih lemah dan tidak mempunyai *bargaining position*. Dalam sistem agribisnis, petani hanya sebagai pelaku pada subsistem *on-farm* atau budidaya saja. Oleh karena itu dalam model agribisnis pada pertanian organik diharapkan adanya peran aktif dari petani pada berbagai subsistem dalam agribisnis. Kondisi ini berkaitan dengan kelembagaan yang ada dalam sistem agribisnis, yaitu lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani. Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, perhimpunan petani pemakai air diharapkan dapat menghadapi tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dan kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial, menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat



Gambar 1. Model Kelembagaan Agribisnis Padi Organik

berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

Selain kelompok tani sebagai pelaku utama, Gapoktan juga memiliki peran penting dalam agribisnis padi organik. Gapoktan dibangun dalam upaya memperkuat posisi daya tawar petani berhadapan dengan pihak luar, baik dari segi kepentingan ekonomi, pemenuhan modal, kebutuhan pasar dan informasi. Dalam model ini Gapoktan diposisikan sebagai lembaga usaha ekonomi pedesaan atau dikenal dengan LUEP (Syahyuti, 2011). Alternatif lain adalah dirintisnya pendirian koperasi petani organik oleh Gapoktan Simpatik, diharapkan menjadi salah satu pijakan untuk menjadikan petani sebagai pelaku agribisnis dari hulu sampai hilir. Koperasi petani organik yang merupakan wadah organisasi bagi petani organik diharapkan mampu menaungi petani organik pada berbagai subsistem agribisnis, salah satunya sebagai unit pemberi kredit bagi petani. Pada awal implementasi budidaya padi organik, kebutuhan input usahatani dinilai sangat besar, misalnya kebutuhan pupuk kandang/organik. Keterbatasan petani dalam pendanaan, menyebabkan jumlah masukan input pada usahatani padi organik juga tidak memenuhi standar kecukupan untuk padi organik. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka diperlukan suatu model kelembagaan agribisnis yang mampu berakomodir berbagai kepentingan dan kebutuhan berbagai pelaku

yang terlibat dalam pengembangan agribisnis padi organik, sehingga mampu mensinergikan berbagai subsistem dalam sistem agribisnis terintegrasi antara satu dengan lain untuk mencapai tujuan. Hal ini dilakukan dengan pendekatan sistem agribisnis, sebagaimana digambarkan pada bagan Gambar 1.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, beberapa hal penting untuk mendapat catatan, antara lain: i) kelembagaan pada agribisnis padi organik belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai upaya pemberdayaan organisasi; ii) Model pada kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem agribisnis dan dimensi kelembagaan serta tiga pilar kelembagaan baru; iii) lemahnya koordinasi, sinergi, dan efektivitas kebijakan agribisnis memerlukan adanya revitalisasi kelembagaan yang diarahkan untuk memantapkan kelembagaan pada sistem agribisnis; iv) perlu adanya intervensi pemerintah dalam pemasaran padi organik, karena harga padi konvensional dan padi organik yang diterima petani belum berbeda secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Downey, W.D. and S.P. Erickson. 1987. *Agribusiness Management, Second Ed.* New York: McGraw Hill.
Guidi, D. 2011. *Sustainable Agriculture Enterprise:*

-
- Framing Strategies to Support Smallholder Inclusive Value Chains for Rural Poverty Alleviation. *CID Research Fellow and Graduate Student Working. Working Paper*. Center for International Development at Harvard University.
- Kusnandar, D., W. Padmaningrum, Rahayu, dan A. Wibowo. 2013. Rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1): 92-101.
- Michelsen, J., K. Lynggaard, S. Padel, and C. Foster C. 2001. Organic farming development and agricultural institutions in Europe: a study of six countries. *Organic Farming: Economic and Policy* vol 9.
- Uphoff, N. 1992. Local institutions and participation for sustainable development. Gatekeeper Series SA31. London: IIED
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simatupang, P. dan W. Rusastrasaya. 2004. *Kebijakan Ekonomi Beras Nasional. Perekonomian Indonesia padi dan beras*. (Ed. F. Kasryno, et al., 2004). Jakarta: Badan Litbang Pertanian.
- Sukmadinata, dan N. Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Syahyuti. 2004. *Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian di Lahan Lebak: Aspek kelembagaan dan Aplikasinya dalam Pengembangan Pertanian*. Bogor: Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian.
- Syahyuti. 2011. *Gampang-gampang Susah Mengorganisasikan Petani. Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi*. Bogor: Penerbit IPB Press.